

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis rasio keuangan dari indikator kinerja keuangan yang ada pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 dapat disimpulkan kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 dan 2020 kinerja keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berada pada kriteria B (sedang) terletak pada $35 < TS \leq 45$ dengan perolehan skor 66%.
2. Pada tahun 2021 kinerja keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berada pada kriteria B (sedang) terletak pada $35 < Total Skor \leq 45$ dengan perolehan skor 32%.
3. Kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka kriteria B (sedang) pada tahun 2019-2021 jadi kinerja tersebut cukup mampu dalam mempertahankan kinerja keuangannya. Rumah sakit harus lebih meningkatkan kewajiban jangka pendeknya pada bagian periode Penagihan piutang dan rasio kas.

6.2 Saran

Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
Diharapkan pihak rumah sakit meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit dan meningkatkan pengelolaan keuangan terutama pada periode penagihan piutang dan rasio kas agar dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan secara maksimal, baik untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta untuk aktivitas rumah sakit lainnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian di bidang kinerja keuangan pada suatu perusahaan, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan dengan metode penelitian yang sama dan rumah sakit yang berbeda guna keberlakuan temuan ini secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djarwanto. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Mangkunegara. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Syamsudin. (2007). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Jurnal

- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.
- Gusti Ayu Yuni Antari. (2016), *Analisis Laporan Keuangan sebagai dasar untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli*.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Munawir, 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Liberty. Yogyakarta. Soemitro, 2001, *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Oktaviani, Viki (2017), *Analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan pada badan layanan umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Jakarta*. pada tanggal 14 Oktober 2009.

Skripsi

- Khairana Amalia Chrishartoyo, Sri Rahayu, Djusnimar Zutilisna (2017), *Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta tahun 2004-2015)*

Peraturan

No.71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan dan laporan keuangan berdasarkan peraturan menteri keuangan No.76 Tahun 2008.*

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan pemerintahan nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*

Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur.

Srimindarti, (2006). *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja* diakses dari <http://asmakmalaiikat.com/go/artikel/ekonomi/Eko32.htm>

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 36/PB/2016.